

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan memberikan gambaran dan informasi atas kinerja organisasi yang diperlukan oleh pihak internal maupun eksternal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan sesuai amanat Undang-Undang dan memenuhi tuntutan masyarakat dalam pelaksanaan akuntabilitas sektor publik melalui *good government governance*. Laporan keuangan yang berkualitas akan mengikis ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan banyaknya aparat pemerintah yang tersandung kasus korupsi.

Pemerintah bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang efisien dan responsif sebagaimana amanat Undang-Undang dan memenuhi tuntutan masyarakat dalam pelaksanaan akuntabilitas sektor publik melalui *good government governance*. Salah satu upaya dalam penerapan prinsip-prinsip *good government governance* adalah meningkatkan akuntabilitas dengan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006:3). Media pertanggungjawaban tersebut berupa laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah pusat/daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara/daerah tersebut diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah sekaligus menggambarkan kondisi keuangan negara/daerah. Hasil akhir dari pemeriksaan adalah pemberian opini mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 7 ayat (1) dan (2), hasil pemeriksaan tersebut akan digunakan oleh para pemakai informasi keuangan negara/daerah (Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan.

Pemeriksaan dilakukan guna menilai dan melihat sejauhmana kegiatan pemerintahan dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya pemeriksaan atau audit biasanya dilakukan untuk menilai apakah ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi atau sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemeriksaan juga dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan pemerintahan atau pelaksanaan kegiatan operasional pemerintah sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku (Mahardika, 2015). Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang telah ditetapkan. Standar auditing yang telah ditetapkan mengharuskan auditor menyatakan apakah, menurut pendapatnya, laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan jika ada, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode berikutnya (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011:110.1).

Kepercayaan yang besar dari masyarakat khususnya pihak-pihak pemakai laporan keuangan yang telah diaudit terhadap jasa yang diberikan akuntan publik mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas hasil kerja yang dilakukannya. Hal itu berarti dalam melaksanakan audit para auditor harus memiliki kompetensi, independensi dan juga profesionalisme yang akan menentukan hasil ataupun kualitas audit (Nugrahini, 2015). Untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang maksimal, seorang pemerika harus memiliki kecakapan profesional atau sering disebutkan dengan profesionalisme. Profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau kualitas dari seseorang yang professional. Seseorang yang

memiliki jiwa profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja yang profesional (Suantara, 2014). Selain profesionalisme, pengalaman kerja seorang auditor di Inspektorat juga merupakan suatu faktor yang penting untuk menunjang suatu kualitas audit yang baik. Dengan adanya pengalaman kerja yang baik seorang auditor juga akan memiliki keahlian audit terkait dengan masalah yang diperiksanya. Dengan itu seorang auditor butuh sikap yang independen dan mematuhi kode etik yang sudah ditetapkan demi mendapatkan kualitas audit yang baik. Sedangkan independensi adalah pertimbangan yang bersifat objektif, atau tidak memihak yang dimiliki oleh auditor dalam menyatakan pendapatnya berdasarkan pertimbangan fakta yang ada (Priyansari, 2015). Kualitas audit adalah karakteristik audit yang telah dapat memenuhi standar auditing dan juga standar pengendalian mutu yang telah menggambarkan praktik audit serta menjadi ukuran dari kualitas dalam pelaksanaan tugas untuk memenuhi tanggung jawab profesinya (Nugrahini, 2015). Maka dari itu, pengalaman kerja, independensi dan juga profesionalisme sangat diperlukan oleh seorang auditor untuk menentukan kualitas audit (Agusti, 2013).

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan *good government*. Namun demikian, praktiknya sering jauh dari yang diharapkan. Efendy (2010) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, diantaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur

kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain, ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Auditor harus memiliki dan meningkatkan pengetahuan mengenai metode dan teknik audit serta segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintahan.

Dalam fungsinya sebagai pengawas dan konsultan intern pemerintah, tentu kualitas hasil kerja auditor ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang diambil serta mempengaruhi kualitas hasil auditnya. Kualitas hasil kerja auditor tersebut berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk auditor, kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan. Berkualitas atau tidaknya pekerjaan auditor akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar organisasi. Sehingga auditor dituntut harus memiliki rasa kebertanggungjawaban, sikap tidak memihak, kepatuhan pada aturan yang berlaku dalam setiap melaksanakan pekerjaannya dan

memiliki sikap profesional, agar dapat mengurangi pelanggaran atau penyimpangan yang dapat terjadi pada proses pengauditan.

Riset yang telah dilakukan oleh Nugrahini (2015), Rumengan (2014), Agusti dan Pertiwi (2013) mengenai independensi dan profesionalisme terhadap kualitas audit, menyimpulkan bahwa independensi dan profesionalisme berpengaruh pada kualitas audit. Namun beberapa penelitian lain menemukan hasil yang tidak konsisten (Andarwanto, 2015; Efendy, 2010). Sedangkan Ningtyas (2016), Mahardika (2015), Armada (2014) menemukan bahwa profesionalisme, pengalaman kerja, keahlian audit, independensi, dan etika pemeriksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Berdasar pada latar belakang tersebut di atas, peneliti termotivasi untuk membahas lebih mendalam dengan mengadakan penelitian yang berjudul “PENGARUH KECAKAPAN PROFESIONAL, INDEPEDENSI, DAN LAMA BEKERJA TERHADAP KUALITAS AUDIT” (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo)

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa pokok permasalahan yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Pokok permasalahan yang akan diteliti dirumuskan dalam bentuk rumusan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah kecakapan profesional berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah lama bekerja berpengaruh terhadap kualitas audit?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menguji:

1. Pengaruh kecakapan professional terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo.
2. Pengaruh indepedensi terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo.
3. Pengaruh lama bekerja terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Inspektorat

Sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan Inspektorat dalam meningkatkan kinerjanya sebagai internal auditor/aparat pengawasan pengelolaan keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan *good governance*, sehingga Inspektorat diharapkan dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas, kapabilitas dan kinerjanya.

## 2. Manfaat bagi praktisi

Penelitian ini dapat berguna untuk memperluas wawasan mengenai auditing dan menambah pengetahuan tentang pengaruh kecakapan professional, independensi, dan lama bekerja terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo.

## 3. Bagi Akademisi

Memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor publik di Indonesia terutama sistem pengendalian manajemen di sektor publik.

## 4. Manfaat bagi penelitian selanjutnya

Dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi dalam memperoleh informasi mengenai pengaruh kecakapan professional, independensi, dan lama bekerja terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai penelitian yang dilakukan agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dari penelitian. Sistematika dari masing-masing bab dapat diperinci sebagai berikut:



## BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu mengenai pengertian kecapakan professional, independensi, dan lama bekerja. Dalam tinjauan pustaka ini juga berisi hipotesis dan kerangka pemikiran.

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode ini berisi mengenai identifikasi variabel-variabel, pengukuran variabel, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, reliabilitas alat pengumpulan data, dan teknik analisis data.

## BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai gambaran umum hasil penelitian, pengujian kualitas pengumpulan data, hasil pengujian asumsi, dan hasil pengujian hipotesis

## BAB V PENUTUP

Berisi simpulan dan saran untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya.